



JURNAL EKONOMI AKUNTANSI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KUNINGAN

**INSTITUSIONALISASI DE FACTO INFLASI SENYAP: ANALISIS KUALITATIF
PEMBENTUKAN JARINGAN PERDAGANGAN NONFORMAL DI ZONA
KONFLIK DAN WILAYAH YANG DISANKSI**

Aldi Adi Pratama¹

Prodi Manajemen Industri, Sekolah Vokas, Institut Pertanian Bogor

¹Corresponding author: aldiadipratama20839aldi@apps.ipb.ac.id

ABSTRAK

Periode pasca-2021, ditandai oleh agresi Rusia ke Ukraina, menyaksikan peningkatan drastis sanksi ekonomi sebagai alat diplomatik utama. Dalam skenario ini, model makro ekonomi neoklasik terbukti gagal menangkap kerugian riil yang diakibatkan oleh Inflasi Senyap (*Shrinkflation*) yaitu penurunan kualitas atau kuantitas produk dengan harga nominal yang tetap. Tujuan dari studi kualitatif ini adalah mengisi kekosongan pemahaman mengenai bagaimana biaya paksaan ini diinstitusionalisasikan secara *de facto* oleh para pedagang, sehingga menciptakan Inflasi Senyap struktural yang kebal terhadap kebijakan moneter. Penelitian ini menggunakan metodologi *Grounded Theory* (GT), membangun teori secara induktif melalui *coding* iteratif. Hasil studi menunjukkan dinamika di wilayah sanksi, Inflasi Senyap cenderung sentralistik dan dikendalikan langsung oleh aparat negara, berfungsi sebagai strategi kelangsungan hidup rezim. Kontrol ketat ini memberikan stabilitas dan kredibilitas *de facto* pada jaringan ilegal tersebut. Institusionalisasi *De Facto* Inflasi Senyap ini berevolusi menjadi norma penetapan harga dan kualitas yang diterima pasar, secara efektif menyembunyikan kenaikan biaya hidup riil.

Kata Kunci: Ekonomi Nonformal, Governance, Inflasi Senyap, Institusionalisasi, Sanksi Ekonomi.

ABSTRACT

The post-2021 period, marked by Russia's aggression against Ukraine, has witnessed a dramatic escalation of economic sanctions as a primary diplomatic tool. In this scenario, prevailing neoclassical macroeconomic models have proven inadequate in capturing the real losses inflicted by "Silent Inflation" (or shrinkflation), which is defined as a reduction in product quality or quantity while the nominal price remains constant. The objective of this qualitative study is to fill the gap in understanding how the costs of these coercive measures are institutionalized *de facto* by traders, thereby creating a structural Silent Inflation that is resilient to conventional monetary policy. This research employs the Grounded Theory (GT) methodology, building theory inductively through iterative coding. The study's findings reveal a distinct dynamic: in sanctioned territories, Silent Inflation tends to be centralized and directly controlled by state apparatus, serving as a regime survival strategy. This tight control provides *de facto* stability and credibility to the associated illegal networks. This *De Facto* Institutionalization of Silent Inflation evolves into a market-accepted norm for pricing and quality, effectively concealing the true increase in the cost of living.

Keywords: Informal Economy, Governance, Silent Inflation, Institutionalization, Economic Sanctions.

PENDAHULUAN

Periode setelah tahun 2021, khususnya sejak agresi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, ditandai dengan intensifikasi luar biasa pengenaan sanksi ekonomi sebagai senjata diplomatik. Dalam tatanan internasional kontemporer, sanksi ekonomi telah menjadi instrumen utama diplomasi untuk mengerahkan tekanan, alih-alih keterlibatan militer langsung, dan hal ini terlihat jelas pasca konflik Ukraina. Penggunaan sanksi telah melonjak pesat, meningkat lebih dari sembilan kali lipat antara tahun 2000 dan 2021 (Zulfa et al., 2022). Inflasi konvensional dalam model makro ekonomi neoklasik sering kali menyarankan biaya kesejahteraan teoritis (*theoretical harm*) yang rendah (Agarwal & Kimball, 2022). Namun, analisis menunjukkan adanya jurang yang signifikan antara prediksi teoretis ini dan kerugian besar yang dirasakan publik (*perceived harm*).

Inflasi Senyap (*Shrinkflation*) merepresentasikan biaya tersembunyi yang tidak tertangkap oleh indeks harga resmi. Fenomena ini mencakup berbagai bentuk, seperti *slumpflation* (penurunan kualitas produk) dan *sneakflation* (penurunan kuantitas atau ukuran produk). Konsekuensi dari Inflasi Senyap ini sangat serius, terutama bagi populasi rentan. Sebagai contoh, ketika Indeks Harga Pangan FAO mencapai puncak bersejarah pada Maret 2022 naik 116% dari level tahun 2000, kenaikan harga yang substansial ini, ditambah dengan Inflasi Senyap, secara langsung memperburuk masalah malnutrisi dan krisis kesehatan. Kelompok yang paling terdampak adalah anak-anak yang sangat membutuhkan gizi yang cukup dan lansia yang pendapatannya cenderung tetap (pensiun), sehingga daya beli mereka terpukul keras oleh kenaikan biaya hidup yang terselubung ini (Divyaparvathy, 2025).

Di tengah situasi kekosongan tata kelola yang ditimbulkan oleh konflik dan sanksi, jaringan perdagangan nonformal muncul bukan sekadar sebagai cara beradaptasi, melainkan berkembang menjadi struktur tata kelola yang stabil. Jaringan-jaringan ini, yang sering dikendalikan oleh Aktor Non Negara Bersenjata atau NSAGs (*Non State Armed Groups*), memberlakukan berbagai pungutan, biaya risiko, yang diterapkan secara sistematis dan koersif kepada para pedagang. Biaya paksaan ini kemudian menjadi terinstitusionalisasi secara *de facto*, artinya pedagang mengakui dan menginternalisasi biaya tersebut sebagai komponen permanen dan wajib dalam penetapan harga jual produk. Oleh karena itu, Inflasi Senyap dalam konteks wilayah konflik dan sanksi ini dapat diartikan sebagai biaya transaksi yang dipaksakan dan dipertahankan oleh negara bayangan yang secara efektif mengelola dan mengawasi rute perdagangan ilegal tersebut.

Di wilayah yang dikenai sanksi, aturan nonformal sering kali ditegakkan melalui cara-cara ekstra legal atau *de facto*. Suatu negara dapat menggunakan bentuk koersi nonformal yang dapat disangkal (seperti larangan perdagangan yang tidak diumumkan atau boikot populer) untuk membatasi perdagangan dan memaksakan pengaruh ekonomi (Ferchen & Mattlin, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa jika didukung oleh koersi yang kredibel, aturan informal dapat menggantikan kerangka hukum formal yang berlaku.

Urgensi penelitian ini sangat tinggi karena bertujuan mengatasi kegagalan analisis inflasi standar dan dampak seriusnya pada populasi rentan. Penelitian ini mendesak karena akan mengisi kekosongan pemahaman tentang bagaimana biaya paksaan dari 'di zona konflik/sanksi' di institusionalisasi *de facto* oleh pedagang,

menciptakan Inflasi Senyap struktural yang tak terpengaruh kebijakan moneter. Studi kualitatif ini juga menyoroti jaringan perdagangan nonformal sebagai struktur *governance* stabil yang menggantikan hukum formal. Secara praktis, temuan ini krusial untuk membantu organisasi kemanusiaan dan pembuat kebijakan merancang intervensi yang lebih tepat sasaran di wilayah dengan data inflasi yang tidak kredibel, dengan menyingkap biaya tersembunyi yang merugikan.

Slumpflation

Slumpflation adalah praktik produsen mengurangi kualitas produk atau layanan sambil mempertahankan harga nominal yang sama. Fenomena ini merupakan dampak penting dari inflasi tinggi karena menurunkan kualitas hidup konsumen tanpa tercermin dalam angka tingkat inflasi resmi, sehingga menyembunyikan inflasi riil dan dampaknya yang sebenarnya (Yergin et al., 2024).

Inflasi Senyap

Inflasi Senyap dapat diartikan sebagai gejala dari kegagalan sistem pengukuran statistik tradisional dalam menangkap laju kenaikan harga yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena faktor-faktor penentu inflasi yang bersifat struktural dan kelembagaan sangat sulit untuk diukur dan karenanya tidak dapat dimasukkan secara memadai ke dalam model-model regresi ekonomi standar. Konsekuensi langsung dari ketidakmampuan data resmi ini adalah berkurangnya kredibilitas statistik yang dikeluarkan oleh pemerintah. (Holmes & Wessel, 2016).

Negara Rapuh

Negara Rapuh dan Terdampak Konflik mengacu pada situasi di mana suatu wilayah atau negara dicirikan oleh serangkaian disfungsi kelembagaan dan kerentanan parah. Ciri utamanya adalah tata kelola pemerintahan yang lemah, yang berarti institusi negara memiliki kapasitas yang sangat terbatas sehingga menghambat kemampuan pemerintah pusat untuk menjalankan fungsi-fungsi intinya secara efektif. Negara seringkali gagal dalam mendistribusikan layanan sosial dasar kepada masyarakatnya, termasuk layanan kesehatan yang vital (Bogale et al., 2024).

Negara Gagal

Kegagalan negara terjadi ketika otoritas negara pusat runtuh secara sistematis, seringkali dalam periode waktu yang signifikan, dipicu oleh berbagai faktor destabilisasi seperti perang revolusioner, konflik etnis, perubahan rezim yang merugikan, dan tindak kekerasan politik skala besar termasuk genosida. Kegagalan ini dimanifestasikan dalam dua dimensi utama, pertama, hilangnya legitimasi secara total karena negara tidak lagi mampu menyediakan barang-barang politik positif. Kedua, terjadi hilangnya kapasitas keamanan dan kesatuan negara, dimana pemerintah pusat menjadi impoten, tidak mampu menangkis serangan eksternal, mempertahankan kesatuan regional dari disintegrasi (Bakkour & Sahtout, 2023).

Sanksi Ekonomi

Sanksi ekonomi dapat didefinisikan sebagai tindakan kebijakan restriktif dan hukuman yang diambil oleh satu atau lebih negara (negara pemberi sanksi) terhadap negara target tertentu. Tujuannya adalah untuk membatasi hubungan ekonomi dan politik yang biasanya terjadi, dengan harapan dapat membujuk atau memaksa negara target untuk mengubah kebijakan, perilaku, atau tindakan yang dianggap bermasalah oleh komunitas internasional atau negara pemberi sanksi. Mekanisme ini sering digunakan sebagai alternatif dari intervensi militer, menjadikannya alat utama dalam diplomasi koersif (Morgan et al., 2023).

Ekonomi Nonformal

Ekonomi informal, sering disebut juga sektor informal atau ekonomi bayangan, merujuk pada segala aktivitas atau pekerjaan yang beroperasi di luar kerangka regulasi dan pengawasan ekonomi formal suatu negara. Sektor ini sering menjadi jalan keluar utama bagi masyarakat umum, khususnya ketika mereka menghadapi kesulitan ekonomi dan keterbatasan peluang di pasar formal. Secara teknis, entitas dalam sektor informal adalah perusahaan swasta tidak berbadan hukum yang dimiliki oleh individu atau rumah tangga. Ciri khasnya adalah tidak adanya pemisahan hukum dan finansial yang jelas antara kegiatan produksi perusahaan dengan keuangan pribadi pemiliknya, dan mereka biasanya tidak memiliki pembukuan finansial yang lengkap (Magidi, 2024).

Kelembagaan Institusional

Teori Institusional adalah kerangka kerja sosiologis dan ilmu politik yang mendalam, berfokus pada pemahaman tentang peran krusial institusi dan struktur sosial dalam membentuk dan mengarahkan perilaku dalam masyarakat. Institusi dalam konteks ini tidak hanya merujuk pada organisasi formal, tetapi juga mencakup aturan, norma, nilai, dan rutinitas kognitif yang tertanam kuat dan telah dilembagakan. Teori ini menyatakan bahwa perilaku individu dan strategi organisasi tidak semata-mata didorong oleh pilihan rasional murni yang berorientasi pada efisiensi, melainkan sangat dipengaruhi oleh tekanan institusional untuk mencapai legitimasi dan kesesuaian sosial (Fauziyah et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Untuk menganalisis fenomena yang sangat spesifik dan kurang berteorikan ini (Institusionalisasi *De Facto* Inflasi Senyap), metodologi kualitatif, khususnya *Grounded Theory* (GT). GT adalah rancangan penelitian kualitatif yang fungsi utamanya adalah menciptakan konstruksi dan membangun teori (*generating theory*). Teori ini ditemukan secara induktif dan dibentuk langsung dari data empiris yang dikumpulkan oleh peneliti di lapangan, bukan bersumber dari teori yang sudah ada. Pendekatan ini didefinisikan sebagai metode yang refleksif dan terbuka, yang menekankan pada proses siklus atau berkelanjutan antara pengumpulan data, pengembangan data, pengembangan konsep teoritis, dan tinjauan literatur.

Tahapan riset *Grounded Theory* berlangsung secara simultan. Peneliti melakukan pengamatan, pengumpulan, dan pengorganisasian data, serta

membentuk teori dari data tersebut pada saat yang bersamaan. Secara singkat, metode ini berasumsi bahwa teori sudah tersimpan di dalam data, dan peneliti bertanggung jawab untuk mengungkapkannya (Ruslan et al., 2023). Analisis data akan mengikuti proses *coding* iteratif *Grounded Theory* (GT), terintegrasi dengan analisis tematik :

1. *Coding* Terbuka: Mengidentifikasi konsep dasar dari data melalui transkripsi dan penetapan kode awal (*in vivo codes*).
2. Kategorisasi: Mengelompokkan kode-kode awal menjadi kategori yang lebih ringkas berdasarkan kesamaan manfaat/motivasi (seperti Biaya Transaksi Institusional dan Adaptasi Kualitas Produk) (Larsen et al., 2025)
3. Koding Selektif: Mengidentifikasi kategori inti untuk membangun model teoritis yang menjelaskan bagaimana Institusionalisasi *De Facto* mekanisme *patron-klien* secara sistemik membebankan biaya risiko nonmoneter yang termanifestasi sebagai Inflasi Senyap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontrol Jaringan Ilegal

Dalam konteks wilayah yang dikenai sanksi ekonomi, fenomena Inflasi Senyap menunjukkan mekanisme tata kelola yang berbeda secara signifikan dari yang diamati di zona konflik yang mengalami fragmentasi kekuasaan. Alih-alih terdesentralisasi, Inflasi Senyap di wilayah sanksi seringkali menunjukkan karakteristik sentralisasi vertikal, dimana jaringan perdagangan nonformal secara efektif dikendalikan langsung oleh aparat negara, menjadikannya bagian integral dari strategi kelangsungan hidup rezim. Sebagai ilustrasi, di Suriah, jaringan perdagangan yang digunakan untuk menghindari dampak sanksi internasional dilaporkan berada di bawah kendali operasional dinas keamanan rezim (Herbert, 2022)

Kontrol negara (*state capture*) yang ketat ini berfungsi untuk memastikan bahwa keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas Inflasi Senyap mengalir secara langsung ke kas rezim, yang kemudian digunakan untuk mendanai operasi militer dan menjaga stabilitas politik, sehingga memperkuat daya tahan rezim. Penguasaan oleh layanan keamanan negara memberikan perlindungan logistik dan kekebalan hukum kepada para pedagang ilegal yang terlibat. Ironisnya, intervensi dan kontrol negara inilah yang menjadikan jaringan ini sebagai institusi *de facto* yang paling kredibel dan stabil, karena mereka terlindungi dari ancaman penegakan hukum negara sendiri. Dengan demikian, stabilitas dan keandalan Inflasi Senyap di wilayah yang disanksi sangat bergantung pada kemampuan rezim untuk mengamankan dan memonopoli keuntungan dari perdagangan ilegal tersebut.

Matriks Komparatif Kausalitas dan Dinamika Institusionalisasi

Tabel 1. Perbedaan Kausalitas Inflasi Senyap dan Implikasinya terhadap Solusi

Aspek Dinamika	Zona Konflik (Fokus: <i>Survival</i> /Logistik Perang)	Wilayah Sanksi (Fokus: Blokade/Anti Persaingan)	Implikasi Solusi
Pendorong Utama Kausalitas	Kekosongan tata kelola, kekerasan langsung, kebutuhan logistik perang/survival sipil (Nomleni & Kameo, 2025)	Pemutusan rantai pasok formal, krisis kemanusiaan, upaya konsolidasi kekuasaan oleh rezim.	Solusi harus mengutamakan <i>peacebuilding</i> dan integrasi ekonomi lokal (mikro).
Bentuk Institusionalisasi	Jaringan logistik berbasis milisi/komunitas, didorong oleh kebutuhan barang dasar dan resistensi lokal (Nomleni & Kameo, 2025)	Jaringan mafia terorganisir (kartel minyak, rokok) yang memanfaatkan anomali harga dan dukungan rezim.	Solusi harus melibatkan reformasi sanksi (makro) dan penegakan hukum anti kartel (meso).
Ancaman terhadap Negara Formal	Eskalasi kekerasan dan perpanjangan konflik; Erosi batas negara.	Kerugian pendapatan negara, ancaman stabilitas ekonomi, hambatan usaha bagi pelaku usaha lain (kartel) (Umboh, 2024)	

Sumber : Data diolah Oleh Peneliti (2025)

Konsep ini merujuk pada situasi dimana terjadi penurunan kualitas produk atau layanan yang diberikan kepada konsumen, meskipun harga jual nominalnya tetap sama. Fenomena ini menjadi kontributor utama Inflasi Senyap dan sangat sulit untuk dilacak karena adanya kegagalan dalam pengukuran Indeks Harga Konsumen (IHK). Secara khusus, IHK sering kali tidak mampu menyesuaikan diri atau mencerminkan penurunan kualitas ini secara akurat, terutama di sektor jasa. Maka dari itu para pembuat kebijakan harus memprioritaskan penerapan kebijakan moneter yang bijaksana sebagai kontributor utama dalam mengendalikan inflasi yang tinggi. Selain itu, perlu ada upaya mendorong sektor industri meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi tanpa mengorbankan kualitas atau kuantitas produk. Langkah terakhir yang krusial adalah memantau perubahan harga secara cermat di industri penting, dan siap untuk melakukan intervensi jika teridentifikasi *trend* penyusutan inflasi (atau deflasi) yang tidak wajar (Bashir et al., 2025).

Dispersi Harga dan Biaya Pencarian.

Inflasi yang rendah dan terkelola dapat menghasilkan yang mengejutkan, yaitu peningkatan kesejahteraan konsumen, terutama dalam model ekonomi, memperhitungkan biaya yang dikeluarkan konsumen untuk mencari harga terbaik (*consumer search costs*). Dalam model ini, inflasi yang stabil dapat meningkatkan dispersi harga (rentang harga antara penjual). Dispersi yang lebih besar ini secara paradoks bermanfaat karena meningkatkan imbal hasil dari usaha pencarian konsumen.

Ketika imbal hasil pencarian meningkat, konsumen termotivasi untuk mencari lebih giat, yang pada akhirnya mengurangi kekuatan pasar (atau *market power*) dimiliki oleh perusahaan dan memungkinkan konsumen mendapatkan harga lebih rendah. Selain itu, dalam *menu cost model* (model yang mempertimbangkan biaya penyesuaian harga), inflasi positif rendah lebih baik daripada inflasi nol karena secara berkala menurunkan harga riil barang sebelum perusahaan memperbarui harga nominalnya, yang kembali menguntungkan konsumen (Federal Reserve Board, 2024)

Akibat Inflasi Tidak Terduga dan Kesejahteraan Konsumen

Di tengah situasi negara yang dilanda konflik, dinamika ekonomi menjadi semakin parah. Inflasi tak terduga adalah transfer daya beli yang kuat, menguntungkan peminjam (debitur bersih) dan merugikan pemberi pinjaman (kreditur bersih), karena hutang dilunasi dengan mata uang yang nilainya lebih rendah. Meskipun demikian, seperti yang dikemukakan oleh Loughrey & O'Donoghue (2011/2025), kesejahteraan konsumen tidak hanya ditentukan oleh fluktuasi harga dan pendapatan nominal, tetapi juga oleh variabel nonmoneter lainnya. Dalam konteks konflik, masalah ini diperburuk oleh fenomena *slumpflation*, dimana terjadi penurunan utilitas yang tidak terukur.

Konsumen di wilayah konflik sering kali membayar harga yang sama atau bahkan lebih tinggi untuk komoditas, namun menerima kualitas produk, daya tahan, atau standar layanan yang jauh lebih rendah misalnya, kurangnya sanitasi atau logistik yang buruk. Penurunan utilitas *riil* ini tidak tercermin dalam perhitungan indeks harga konsumen resmi, tetapi secara langsung dan signifikan merongrong standar hidup masyarakat yang sudah rentan, terlepas dari klaim stabil atau rendahnya inflasi resmi.

KESIMPULAN

Inflasi persisten, meskipun pada tingkat rendah, selalu memicu transfer kekayaan sistematis dari kreditur ke debitur, namun dalam konteks zona konflik dan wilayah yang dikenai sanksi, dinamika ini diperburuk dan dimanifestasikan melalui Inflasi Senyap. Kejadian yang berupa penurunan kualitas atau kuantitas produk dengan harga nominal yang sama, menjadi respons mikro produsen terhadap biaya produksi yang melambung tinggi akibat risiko, gangguan logistik, dan fluktuasi mata uang yang ekstrem di wilayah tersebut. Karena kekacauan dan sanksi melumpuhkan pasar formal, kebutuhan pokok semakin banyak dipasok melalui Jaringan Perdagangan nonformal sebuah sistem di luar regulasi yang didominasi oleh risiko tinggi.

Dalam jaringan nonformal ini, pedagang terpaksa menerapkan inflasi senyap secara ekstrem untuk mempertahankan kelangsungan usaha, menggunakan bahan baku inferior atau mengurangi porsi secara drastis. akibatnya, praktik ini tidak hanya menjadi sebuah strategi, tetapi berevolusi menjadi institusionalisasi *de facto*. Sebuah norma penetapan harga dan kualitas yang diterima oleh pasar, yang secara efektif menyembunyikan kenaikan biaya hidup yang *riil* dan jauh melampaui apa yang dapat diukur oleh indeks harga konsumen resmi.

Penelitian selanjutnya harus difokuskan pada pengujian empiris mengenai bagaimana inflasi yang stabil mempengaruhi validitas Teori Fiskal Tingkat Harga (FTPL). Penting untuk diselidiki secara mendalam dalam kondisi apa kenaikan suku bunga nominal terutama ketika kebijakan fiskal mendominasi justru dapat memicu inflasi jangka panjang yang lebih tinggi. Studi ini juga harus memberikan panduan tentang bagaimana kebijakan fiskal dan moneter harus diselaraskan secara optimal untuk mencapai stabilitas harga *riil* dan ekspektasi publik di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, R., & Kimball, M. (2022, April 7). *The future of inflation Part II: How costly is inflation?* *International Monetary Fund – Finance & Development*.
<https://www.imf.org/en/publications/fandd/issues/2022/03/future-of-inflation-partii-agarwal-kimball>
- Bakkour, S., & Sahtout, R. (2023). *The dimensions and attributes of state failure in Syria*. *Journal of Balkan and Near Eastern Studies*, 25(6), 1020–1036.
<https://doi.org/10.1080/19448953.2023.2167337>
- Bashir, S., Joby, A., Wani, F., Bhat, M. A., & Alam, T. (2025). *Shrinking sizes, swelling prices: Evaluating the ripple effects of inflation and shrinkflation on economic growth using dynamic panel framework*. *Global Journal of Emerging Market Economies*.
<https://doi.org/10.1177/09749101251335099>
- Bogale, B., Scambler, S., Mohd Khairuddin, A. N., & Gallagher, J. E. (2024). *Health system strengthening in fragile and conflict-affected states: A review of systematic reviews*. *PLOS ONE*, 19(6), e0305234.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0305234>
- Divyaparvathy, J. (2025). *The hidden cost of inflation: A threat to health and nutrition*. *Journal of Comprehensive Health*, 13, 96–98.
https://doi.org/10.25259/JCH_27_2024
- Fauziyah, S., Jaharuddin, J., Ardiansyah, A., & Syamsiah, N. (2024). Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui isomorfisme institusional: Studi kasus LazisMu di Kota Depok. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 2661–2670.
- Federal Reserve Board. (2024). *Inflation, price dispersion, and welfare: The role of consumer search* (FEDS Working Paper No. 2024-047).
<https://www.federalreserve.gov/econres/feds/files/2024047pap.pdf>

- Ferchen, M., & Mattlin, M. (2023). *Five modes of China's economic influence: Rethinking Chinese economic statecraft*. *The Pacific Review*, 36(5), 978–1004. <https://doi.org/10.1080/09512748.2023.2200029>
- Herbert, G. (2022). *The unintended consequences of economic sanctions*. *The Institute of Development Studies and Partner Organisations*. <https://hdl.handle.net/20.500.12413/17636>
- Holmes, S. E., & Wessel, D. (2016, March 10). *Considering the source: How we perceive inflation data*. *Brookings Institution*. <https://www.brookings.edu/articles/considering-the-source-how-we-perceive-inflation-data/>
- Larsen, M. M., Namatovu, R., & Narula, R. (2025). *An actor-based perspective on informal cross-border trading*. *The Journal of Development Studies*, 1–21. <https://doi.org/10.1080/00220388.2025.2569391>
- Loughrey, J., & O'Donoghue, C. (2011). *The welfare impact of price changes on household welfare and inequality 1999–2010 (IZA Discussion Paper No. 5717)*. SSRN. <https://ssrn.com/abstract=1855149>
- Magidi, M. (2024). *The transformation of Zimbabwe's informal economy: From petty trade to vibrant sector*. *Journal of Asian and African Studies*, 60(8), 5090–5106. <https://doi.org/10.1177/00219096241275388>
- Morgan, T. C., Syropoulos, C., & Yotov, Y. V. (2023). Sanksi ekonomi: Evolusi, konsekuensi, dan tantangan. *Jurnal Perspektif Ekonomi*, 37(1), 3–30. <https://doi.org/10.1257/jep.37.1.3>
- Nomleni, A. P. W., & Kameo, D. D. (2025). Fenomena kemiskinan dan perdagangan pasar gelap di perbatasan Indonesia–Timor Leste. *KRITIS*, 1–124.
- Ruslan, R., Khalifatun, U. N., & Rahman, U. (2023). Penelitian grounded theory: Pengertian, prinsip-prinsip, metode pengumpulan dan analisis data. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(2), 699–708. <https://doi.org/10.33627/es.v6i2.1483>
- Umboh, Y. I. (2024). Penegakan hukum bagi penyelundupan barang di wilayah perbatasan. *Lex Administratum*, 12(4).
- Yergin, H., Günsan, N., & Yiğenoğlu, K. (2024). *Real inflation in the context of shrinkflation and skimpflation*. *Journal of Academic Opinion*, 4(1), 1–6.
- Zulfa, K. K., Arisanto, P. T., & Mahadana, K. R. (2022). Analisis sanksi ekonomi terhadap Rusia atas invasinya di Ukraina 2022. *Jurnal Transformasi Global*, 9(2), 149–162. <https://doi.org/10.21776/ub.jtg.009.02.6>